

JUDICIAL REVIEW AUTHORITY BY THE CONSTITUTIONAL COURT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Rendro Prastyana Winanta^{1(*)a}, Anna Erliyana^{2b}

Universitas Indonesia

rendroprastyanwinanta@gmail.com

annaer@ui.ac.id

(*) Corresponding Author

rendroprastyanwinanta@gmail.com

How to Cite: Rendro Prastyana Winanta. (2024). Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. doi: 10.36526/js.v3i2.5047

Received : 30-12-2024
 Revised : 10-02-2025
 Accepted : 25-02-2025

Abstract

The Constitutional Court (MK) has important implications for the legal system in Indonesia. The Judicial Review carried out by the Constitutional Court acts as a key mechanism in maintaining the constitutionality of laws, including Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) and regional regulations. The Constitutional Court has the authority to examine laws against the 1945 Constitution, functioning as a controller and balancer in the exercise of state power. In this research, data will be collected through a literature study which includes legal literature, journal articles and official documents from the Constitutional Court. This research will also involve qualitative analysis of Constitutional Court decisions related to Judicial Review, including their impact on public policy and the protection of constitutional rights. In addition, interviews with legal practitioners, academics and members of the Constitutional Court can be conducted to gain a broader perspective regarding the challenges and successes in implementing the Judicial Review authority. The analytical method used in this research is descriptive and comparative analysis. Descriptive analysis will be used to describe the Constitutional Court's authority in the context of Judicial Review, while comparative analysis will compare the practice of Judicial Review in Indonesia with other countries that have similar legal systems. Research shows that the Constitutional Court's decision, as in several decisions, has a significant impact on the investigation process and the protection of citizens' constitutional rights. The Constitutional Court's authority in resolving election disputes has also received attention, where the Constitutional Court plays a vital role in ensuring justice and transparency in the democratic process. Apart from that, the Constitutional Court is faced with challenges in exercising its authority, including conflicts with other institutions and the need to reorient the Judicial Review authority. The implications of this Judicial Review authority are very broad, including legal and governmental stability. The Constitutional Court's decision not only affects existing regulations, but can also form new legal norms that have the potential to strengthen or weaken the existing legal system. Therefore, it is important to have a deep understanding of the Constitutional Court's authority and its impact on the legal system, as well as the need to strengthen regulations that support the implementation of Judicial Review effectively and efficiently.

Keywords:
 Judicial Review,
 Mahkamah Konstitusi,
 Sistem Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Judicial Review adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Konsep ini mengacu pada kewenangan lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Judicial Review, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Mekanisme ini sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Maulidi, 2019; Siahaan, 2021).

Keberadaan Judicial Review di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan MK itu sendiri. Lembaga ini didirikan untuk mengisi kebutuhan akan badan independen yang memiliki kewenangan khusus dalam menguji konstitusi. Sebelum adanya MK, pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Agung yang memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut. Pemisahan kewenangan antara kedua lembaga ini memberi ruang bagi MK untuk fokus pada isu-isu konstitusi, sementara Mahkamah Agung menangani perkara hukum lainnya. Dengan demikian, MK memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Nasir, 2020; Siahaan,

2021).

Lebih jauh, Judicial Review mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui mekanisme ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang melindungi hak-hak individu dan kelompok dari peraturan yang berpotensi merugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan konstitusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Iristian, 2024; Qalsum & Wibowo, 2023). Dengan adanya Judicial Review, masyarakat memiliki alat hukum yang dapat digunakan untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan konstitusi.

Peran MK dalam menguji undang-undang sangatlah krusial. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mengikat, artinya seluruh pihak, termasuk pemerintah, wajib mematuhi. Namun, implementasi putusan ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hal penegakan hukum dan kepatuhan dari lembaga negara lainnya (Aris, 2020; Maulidi, 2019). Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana putusan MK dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam penelitian ini, ada dua pertanyaan utama yang akan dibahas. Pertama, bagaimana cakupan kewenangan MK dalam melakukan Judicial Review? Kedua, bagaimana dampak Judicial Review terhadap sistem hukum di Indonesia? Pertanyaan pertama akan mengulas batasan dan ruang lingkup kewenangan MK dalam menguji undang-undang, sedangkan pertanyaan kedua akan membahas bagaimana Judicial Review memengaruhi praktik hukum dan penegakan keadilan di Indonesia (Saputro et al., 2022; Satria et al., 2022). Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran MK dalam sistem hukum nasional.

Kewenangan Judicial Review oleh MK didasarkan pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Aturan ini memberi dasar hukum bagi MK untuk menguji konstusionalitas suatu undang-undang. Setiap individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dapat mengajukan permohonan Judicial Review. Proses ini melibatkan analisis substansi undang-undang dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi (Collins, 2019; Iristian, 2024). Dengan begitu, MK memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tetap sesuai dengan nilai-nilai konstusional yang dijunjung (Qalsum & Wibowo, 2023; Satria et al., 2022) tinggi oleh negara.

Dampak Judicial Review terhadap sistem hukum di Indonesia cukup besar. Pertama, mekanisme ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses hukum dan menuntut keadilan. Dengan Judicial Review, individu dapat menantang undang-undang yang dianggap merugikan, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, Judicial Review juga berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia karena putusan MK sering kali menjadi rujukan dalam berbagai kasus hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kewenangan dan implikasi Judicial Review oleh MK. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran MK dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi guna meningkatkan efektivitas sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia (Aris, 2020; Rustam et al., 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada dunia akademik, tetapi juga memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Dengan memahami lebih dalam mengenai Judicial Review dan peran MK, masyarakat dapat lebih menyadari hak-hak konstusional mereka dan lebih berani mengambil langkah hukum jika merasa dirugikan oleh peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (Pradana et al., 2024; Qalsum & Wibowo, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

Dalam skala yang lebih luas, Judicial Review mencerminkan dinamika hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia. Proses ini menjadi instrumen untuk menguji apakah kebijakan pemerintah telah sejalan dengan konstitusi, yang pada akhirnya membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan (Butt, 2019; Hasani et al., 2022). Dengan demikian, Judicial Review bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

Judicial Review memegang peranan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-

hak konstitusional masyarakat. Dengan adanya peran aktif MK dalam menguji undang-undang, diharapkan sistem hukum Indonesia semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi MK dalam konteks Judicial Review serta dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia (Qalsum & Wibowo, 2023; Romadhon et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum dan keadilan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini dirancang untuk menggali lebih dalam tentang kewenangan Judicial Review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan bagaimana hal ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan MK yang relevan. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana kewenangan Judicial Review diatur dalam konstitusi dan bagaimana penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia (Maulidi, 2019; Sa'adah, 2019).

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum, artikel jurnal, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh MK. Selain itu, analisis kualitatif terhadap putusan-putusan MK yang berkaitan dengan Judicial Review juga akan dilakukan, dengan tujuan untuk memahami dampaknya terhadap kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional (Hasani et al., 2022; Nining, 2023). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan anggota MK juga akan diadakan, guna mengetahui tantangan serta keberhasilan dalam pelaksanaan kewenangan Judicial Review (Rishan, 2022; Satrio, 2018).

Dalam menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan analisis, yakni analisis deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kewenangan MK dalam konteks Judicial Review, sementara analisis komparatif akan membandingkan praktik Judicial Review di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa (Butt, 2019; Wijaya et al., 2024). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kewenangan Judicial Review oleh MK serta implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Judicial Review adalah salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum Indonesia. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menegaskan bahwa MK berwenang menguji kesesuaian suatu undang-undang dengan UUD 1945, yang menunjukkan peran penting MK dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara (Darmadi, 2020; Satria et al., 2022). Landasan hukum Judicial Review di Indonesia sangat kuat, dengan MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan UUD 1945. Posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan perannya dalam menegakkan supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional (Ningrum et al., 2023a; Sujono, 2022).

Secara umum, Judicial Review di MK terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berfokus pada prosedur pembuatan suatu undang-undang, sementara pengujian materiil menilai isi atau substansi undang-undang tersebut. Pengujian formil bertujuan memastikan bahwa undang-undang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan pengujian materiil menilai apakah isi undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip UUD 1945 (Putra, 2022; Wicaksono & Nugroho, 2021). Proses Judicial Review di MK dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan ini harus memenuhi syarat tertentu, termasuk identifikasi norma yang diuji dan alasan mengapa norma tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi (Latuheru et al., 2022; Rozi, 2023). Setelah permohonan diajukan, MK akan memeriksa perkara dengan mempertimbangkan argumen dari pemohon dan pihak terkait lainnya (Nata & Baskoro, 2023; Romadhon et al., 2022).

Setelah melalui pemeriksaan, MK akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini memiliki dampak hukum yang besar, termasuk pembatalan suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Karena sifatnya final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah putusan

dikeluarkan, sehingga keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang tinggi (Suhariyanto, 2016). Dampak dari putusan MK sangat luas, baik bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat. Bagi pembuat undang-undang, putusan MK menjadi pedoman dalam merancang peraturan agar tetap sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, bagi masyarakat, Judicial Review menjadi jaminan perlindungan hak-hak mereka (Ningrum et al., 2023b; I. D. G. A. D. Putra, 2021).

Namun, meskipun MK memiliki kewenangan yang kuat, pelaksanaan putusnya masih menghadapi tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada lembaga yang belum sepenuhnya mematuhi putusan MK, termasuk Mahkamah Agung, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (Nata & Baskoro, 2023; Saputra et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum agar putusan MK dapat dilaksanakan dengan efektif. Judicial Review bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan demokrasi dan keadilan di Indonesia. MK berperan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan legislatif dan perlindungan hak individu, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan (Kurnia, 2016; Sujono, 2022).

Kewenangan Judicial Review juga mencerminkan hubungan antar lembaga negara. Selain sebagai penguji peraturan perundang-undangan, MK juga berperan mengawasi kebijakan lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga memastikan berjalannya sistem checks and balances dalam pemerintahan (Darmadi, 2020; Latuheru et al., 2022). Dalam praktiknya, MK sering menghadapi perkara yang kompleks dan kontroversial, yang membutuhkan analisis hukum yang mendalam. Oleh karena itu, putusan MK harus selalu berlandaskan hukum dan prinsip keadilan agar tetap mendapatkan kepercayaan publik (Bisariyadi, 2018; Butt, 2019).

Judicial Review oleh MK merupakan instrumen penting dalam menjaga konstitusi dan hak-hak warga negara. Dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas, MK berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia (Rozi, 2023; Silalahi, 2023). Namun, tantangan dalam pelaksanaan putusan MK dan potensi ketidakpastian hukum harus menjadi perhatian bersama. Kepatuhan terhadap putusan MK dan penguatan mekanisme penegakan hukum perlu menjadi prioritas agar Judicial Review dapat berjalan efektif (Nata & Baskoro, 2023; Saputra et al., 2024).

Dengan demikian, Judicial Review oleh MK bukan hanya sekadar kewenangan hukum, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Melalui Judicial Review, MK memastikan bahwa setiap peraturan mencerminkan nilai-nilai konstitusi dan memenuhi harapan masyarakat (Ningrum et al., 2023a; Sujono, 2022). Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan mekanisme Judicial Review perlu terus dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, MK dapat terus menjalankan perannya secara efektif sebagai penjaga konstitusi di Indonesia (Aji, 2023; Latuheru et al., 2022).

Implikasi Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Judicial Review di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. Proses ini memberikan Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan untuk menilai dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembatalan terhadap norma hukum tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan legislasi, tetapi juga memperkuat supremasi konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, Judicial Review menjadi mekanisme yang esensial dalam menjaga keselarasan dan konsistensi hukum nasional dengan prinsip-prinsip konstitusi (Tambunan et al., 2024).

Salah satu implikasi utama dari Judicial Review adalah terciptanya harmonisasi sistem hukum nasional. Proses ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam UUD 1945. Ketika MK membatalkan suatu norma, hal ini tidak hanya menghapuskan norma tersebut, tetapi juga mendorong legislator untuk lebih hati-hati dalam merumuskan undang-undang di masa depan, sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik hukum (Tambunan et al., 2024).

Dalam kerangka praktik ketatanegaraan, Judicial Review memperkuat prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara dapat diawasi dan dievaluasi berdasarkan konstitusi, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah, serta menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan (Yandy et al., 2024). MK berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Melalui putusan yang diambil, MK dapat melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara (Tambunan et al., 2024).

Peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan juga memiliki signifikansi besar. Dengan adanya Judicial Review, MK dapat bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan eksekutif dan legislatif, mencegah dominasi

kekuasaan oleh satu lembaga. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Yandy et al., 2024). Dalam berbagai kasus, MK telah menunjukkan kemampuannya dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara, yang semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini (Tambunan et al., 2024).

Salah satu contoh kasus Judicial Review yang berdampak besar adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menekankan pentingnya etika hakim dalam menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana Judicial Review tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma hukum, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip etika dalam praktik peradilan (Tambunan et al., 2024). Keputusan ini memberikan dampak yang luas terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan serta mendorong peningkatan kualitas peradilan di Indonesia.

Meski demikian, meskipun Judicial Review membawa banyak implikasi positif, terdapat tantangan dan kritik yang perlu mendapat perhatian. Salah satu tantangan utama adalah konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum. Kadang-kadang, keputusan MK dianggap tidak konsisten, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Kushadianto & Putra, 2024). Selain itu, kritik juga muncul terkait potensi politisasi dalam proses Judicial Review, di mana keputusan MK dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Tambunan et al., 2024).

Kritik lain yang sering disuarakan adalah mengenai akses masyarakat terhadap proses Judicial Review. Meskipun MK berusaha membuka akses bagi masyarakat, masih terdapat kendala terkait pemahaman hukum dan biaya yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Judicial Review (Tambunan et al., 2024). Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses hukum, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari Judicial Review.

Dalam konteks perlindungan hak konstitusional, MK berfungsi sebagai lembaga yang menjaga hak-hak dasar warga negara. Namun, tantangan dalam implementasi keputusan MK sering kali muncul, terutama dalam hal penegakan hukum di lapangan. Meskipun MK dapat membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, penegakan keputusan tersebut sering bergantung pada lembaga eksekutif dan legislatif (Yandy et al., 2024).

Judicial Review memiliki implikasi mendalam terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga berperan dalam memperkuat prinsip konstitusionalisme, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun terdapat tantangan dan kritik, peran MK sebagai lembaga pengawas dan penjaga hak asasi manusia tetap sangat penting dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia (Tambunan et al., 2024).

Judicial Review di Indonesia memiliki dampak yang sangat penting terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. Proses ini memberikan Mahkamah Konstitusi (MK) peran untuk menilai dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketika MK membatalkan suatu norma hukum, hal ini bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat posisi konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, Judicial Review berperan besar dalam menjaga agar hukum yang berlaku tetap sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi (Tambunan et al., 2024).

Salah satu dampak utama dari Judicial Review adalah terciptanya keselarasan antara sistem hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Ketika MK memutuskan untuk membatalkan norma tertentu, hal ini tidak hanya menghapuskan norma tersebut, tetapi juga memberikan pelajaran bagi pembuat undang-undang untuk lebih hati-hati dalam merumuskan peraturan di masa depan. Ini membantu mengurangi risiko terjadinya pertentangan atau konflik hukum di kemudian hari (Kushadianto & Putra, 2024).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Judicial Review juga memperkuat prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Dengan adanya mekanisme ini, setiap kebijakan atau tindakan dari pemerintah dan lembaga negara dapat diawasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa semuanya tetap sesuai dengan konstitusi. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak disalahgunakan (Yandy et al., 2024). MK, dalam hal ini, berperan penting sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara, dengan memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan negara yang sewenang-wenang (Tambunan et al., 2024).

Peran MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara juga sangat vital. Dengan adanya Judicial Review, MK bertindak sebagai pengawas bagi tindakan eksekutif dan legislatif, sehingga mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga saja. Ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Yandy et al., 2024). Dalam berbagai kasus, MK telah menunjukkan kemampuannya dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara, yang semakin meningkatkan kepercayaan publik

terhadap lembaga ini (Tambunan et al., 2024).

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya Judicial Review adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menekankan pentingnya etika hakim dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam dunia peradilan. Kasus ini memperlihatkan bahwa Judicial Review tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika tetap dijaga dalam setiap proses peradilan (Tambunan et al., 2024). Keputusan ini membawa dampak yang luas, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Namun, meskipun Judicial Review memberikan banyak dampak positif, ada beberapa tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah terkait dengan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Terkadang, keputusan MK dianggap tidak konsisten, yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Kushadianto, 2024). Selain itu, ada juga kritik yang mengarah pada kemungkinan politisasi dalam proses Judicial Review, di mana keputusan MK bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Tambunan et al., 2024).

Kritik lainnya adalah mengenai akses masyarakat terhadap proses Judicial Review. Meskipun MK berusaha untuk membuka akses lebih luas, masih ada kendala terkait dengan pemahaman hukum yang terbatas dan biaya yang cukup besar untuk mengajukan permohonan Judicial Review (Tambunan et al., 2024). Hal ini bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam proses hukum, padahal partisipasi masyarakat adalah salah satu tujuan utama dari Judicial Review.

Dalam hal perlindungan hak konstitusional, MK berfungsi sebagai lembaga yang menjaga hak-hak dasar warga negara. Namun, tantangan sering kali muncul dalam implementasi keputusan MK, terutama dalam hal penegakan hukum di lapangan. Meskipun MK dapat membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, penegakan keputusan tersebut sering kali bergantung pada lembaga eksekutif dan legislatif (Yandy et al., 2024).

Judicial Review memberikan dampak yang mendalam terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga memperkuat prinsip konstitusionalisme, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun ada tantangan dan kritik, peran MK sebagai lembaga pengawas dan penjaga hak asasi manusia tetap sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia (Tambunan et al., 2024).

Tantangan dan Kritik terhadap Judicial Review oleh MK

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaan kewenangan ini tidak tanpa tantangan dan kritik. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan MK. Meskipun MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ada kalanya keputusan MK tidak diindahkan oleh pembentuk undang-undang, yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Putra, 2022). Pembangkangan terhadap putusan MK kerap terjadi, dan tidak ada norma yang mengatur sanksi bagi pembuat undang-undang yang mengabaikan putusan tersebut (Saputra et al., 2024).

Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai politisasi dalam keputusan MK. Beberapa putusan tampak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang berpotensi merusak integritas lembaga ini (Simamora, 2014). Sebagai contoh, dalam beberapa keputusan yang bersifat open legal policy, terdapat tarik-menarik antara pendekatan judicial activism dan judicial restraint di kalangan hakim MK. Ketegangan ini bisa memengaruhi konsistensi dan objektivitas keputusan (Satriawan & Lailam, 2019), yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana MK bisa tetap independen dan objektif dalam mengawasi konstitusi.

Inkonsistensi dalam putusan MK juga menjadi isu yang sering disorot. Ada kalanya keputusan MK tidak memberikan kepastian hukum, karena ada perbedaan dalam perlakuan terhadap pemohon yang menciptakan kebingungan. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang diharapkan memberikan kepastian hukum (Nata, 2023). Misalnya, perbedaan perlakuan terhadap pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 menunjukkan bahwa MK belum memiliki standar yang jelas dalam menentukan kedudukan hukum pemohon (Aji, 2023).

Tantangan lain yang dihadapi MK adalah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan dalam melakukan Judicial Review. Beberapa pihak menilai bahwa model kewenangan yang ada saat ini rawan disalahgunakan, yang dapat merusak pilar-pilar hukum (Simamora, 2014). Ini menunjukkan bahwa perlu ada

penataan kembali terhadap kewenangan MK agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusi. Tidak kalah pentingnya adalah dampak putusan MK terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Jika putusan tidak konsisten atau bahkan tidak diindahkan, hal itu dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat (Putra, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK, baik dari legislatif maupun eksekutif, agar fungsi Judicial Review bisa berjalan dengan baik dan efektif.

Masalah eksekutabilitas putusan juga menjadi tantangan besar. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari lembaga lain dalam sistem peradilan (Suhariyanto, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan yang kuat, tantangan dalam pelaksanaan putusan tetap ada dan perlu diatasi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, MK perlu terus beradaptasi dan memperbaiki mekanisme internalnya. MK perlu mengembangkan pedoman yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan dan penanganan kasus-kasus Judicial Review, agar dapat meningkatkan kualitas putusan dan memperkuat posisinya sebagai penjaga konstitusi. Lebih dari itu, penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara MK dan lembaga-lembaga lain, seperti Mahkamah Agung dan lembaga legislatif, untuk memastikan bahwa putusan MK dihormati dan dilaksanakan secara efektif (Suhariyanto, 2016). Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan dan kritik terhadap Judicial Review oleh MK meliputi keterbatasan kewenangan, potensi politisasi, dan inkonsistensi putusan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara MK dan lembaga-lembaga terkait, serta pengembangan pedoman yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan MK dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

PENUTUP

Peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa MK memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dan pengawas pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan Judicial Review, MK memastikan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Judicial Review ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dampak dari Judicial Review terhadap peraturan dan hak konstitusional sangat signifikan. Selain menilai konstitusionalitas undang-undang, MK juga berperan dalam membentuk preseden hukum yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan-keputusan MK sering menjadi rujukan bagi pengadilan dan lembaga negara lainnya, sehingga memperkuat supremasi konstitusi di Indonesia.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas MK perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. MK perlu mengadopsi praktik yang lebih terbuka dalam pengambilan keputusan, termasuk dengan mempublikasikan alasan di balik setiap keputusan. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami proses hukum dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap lembaga peradilan. Keterlibatan masyarakat dalam proses Judicial Review juga dapat memperkaya perspektif serta meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh MK. Sinergi antara MK dan lembaga hukum lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, juga sangat penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Kerjasama antar lembaga ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, lembaga-lembaga ini dapat saling membantu untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum yang terintegrasi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

MK juga perlu memperhatikan perkembangan hukum internasional dan praktik terbaik dari negara lain dalam menjalankan Judicial Review. Pembelajaran dari pengalaman negara lain dapat memberikan wawasan baru yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas MK dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penelitian mengenai efektivitas mekanisme Judicial Review di Indonesia. Penelitian yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis bukti, diharapkan MK dapat terus beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B. (2023). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. *Soedirman Law Review*, 5(4), 39–56.
- Aris, T. W. (2020). Urgensi Judicial Review Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 142. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1930>
- Bisariyadi, B. (2018). Distinguishing Constitutional and Statutory Interpretation in Judicial Review Cases: A Blurred Boundary Line. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 235. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1980>
- Butt, S. (2019). Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, 6(01), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Collins, J. S. (2019). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688. <https://doi.org/10.31078/jk1541>
- Darmadi, N. S. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1088. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>
- Hasani, I., Halili, H., & Balakrishnan, V. (2022). Undelivered constitutional justice? Study on how the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia are executed. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 45–52. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.48378>
- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>
- Kurnia, T. S. (2016). Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1212>
- Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya terhadap Penafsiran dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476–1484. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Latuheru, P. M., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Sidartha, D. B. (2022). Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 351–357.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 339. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Nasir, C. (2020). Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 67–80. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>
- Nata, A. R., & Baskoro, M. R. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(02), 105–117. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>
- Ningrum, M. P., Roza, A. F., Sari, K., & Hariani, R. R. (2023a). Asas Kepastian Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Lectio Law Journal*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>
- Ningrum, M. P., Roza, A. F., Sari, K., & Hariani, R. R. (2023b). Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Lectio Law Journal*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>
- Nining. (2023). Observing the Existence of the Constitutional Court Addresses the Evolving Dynamics and Challenges of the Legal System in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 1(3), 227–234. <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.100>
- Pradana, S. A., Mannan, K., Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*, 5(2), 106–116. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Putra. (2022). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putra, I. D. G. A. D. (2021). Layout dan Arsitektur Puri, Diantara Politik Kekuasaan dan Identitas Budaya. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 5(2), 137–150. <https://doi.org/10.36040/pawon.v5i2.3549>
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87–95. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>

- Rishan, I. (2022). Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 92–105. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1058>
- Romadhon, A. H., Sadjijono, S., & Widoyoko, W. D. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. *Anima Legis*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55840/al.v1i1.8>
- Rozi, F. (2023). Polemik Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 6(1), 383. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5284>
- Rustam, R., Marlina, T., & Handoko, D. (2022). Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *JURNAL DIMENSI*, 11(2), 270–281. <https://doi.org/10.33373/dms.v11i2.3973>
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235–247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Saputra, P., Asnawi, E., & Azmi, B. (2024). Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *South East Asia Law Aspect*, 1(1), 21–27. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>
- Saputro, J. D., Sinaulan, R. L., & Suganda, A. (2022). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1905–1918. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28924>
- Satria, R., Fitriani, R. A., Astono, A., & Purwanto. (2022). Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 60–67. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.67>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Satrio, A. (2018). Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government: What Can the Constitutional Court Do? *Constitutional Review*, 4(2), 271. <https://doi.org/10.31078/consrev425>
- Siahaan, M. (2021). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 729–752. <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Silalahi, W. (2023). Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung. *Jurnal Bawasl Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 13–23. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>
- Simamora, J. (2014). Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 388. <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171. <https://doi.org/10.31078/jk1318>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 585. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Wicaksono, I., & Nugroho, R. M. (2021). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(1), 67–89. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.4092>
- Wijaya, M. H., Subawa, I. M., Palguna, I. D. G., Astariyani, N. L. G., & Sumadi, I. P. S. (2024). Legal Morality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Based on Pancasila. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(9), 4121–4136. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i9.10863>
- Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 7(1), 165–183. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>